

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE**  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan)

**Rusnadia Wafa<sup>1)</sup>, Yesi Mutia Basri<sup>2\*)</sup>, dan Desmiyawati<sup>3)</sup>**

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: [yesimutia@gmail.com](mailto:yesimutia@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh beberapa faktor terhadap penerapan tata kelola yang baik. Faktor-faktor ini adalah Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan adalah proporsional stratified random sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Good Governance.

**Kata kunci:** Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**Abstract**

*This research was aimed to examine empirically the effect of several factors on the application of good governance. These factors are Government Apparatus Competency, Community Participation and Government Internal Control Systems. The population that will be used in this research are village government in Pelalawan district. The method used was proportional stratified random sampling. The method of data analysis in this study is use multiple linear regression with SPSS version 25. The results of this study prove that the Competence of Government Apparatus, Community Participation and Government Internal Control Systems significantly positive affect on the Implementation of Good Governance.*

**Keywords:** Competence of Government Apparatus, Community Participation Government Internal Control System

## 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi hak pemerintah daerah mengatur kekayaan daerahnya sendiri, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah Daerah telah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah, maupun pada tingkat pemerintahan desa. Pemerintahan lokal

memiliki peluang yang besar untuk mendorong demokratisasi karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang responsif, representatif, partisipatif, dan akuntabel (Helmayani *et al.*, 2017).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan laporan dari *Transparency International* tentang *Corruption perception index* (CPI) 2016 menempatkan Indonesia ranking 90 dengan skor 37 masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia (*Transparency International*, 2017). Laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2015 melaporkan, secara nasional ada 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) laporan/ pengaduan masyarakat tahun 2015, sebanyak 41,59 persen atau 2.853 (dua ribu delapan ratus lima puluh tiga) laporan, mengeluhkan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah (Ombudsman Republik Indonesia, 2016). ICW juga mencatat bahwa sektor anggaran desa menyumbang kasus korupsi terbesar pada 2018.

Menurut Agus Pramusinto, menyebut bahwa *Good Governance* di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Banyaknya kasus korupsi, penyelewengan kebijakan, dan pelayanan publik yang menyulitkan masyarakat menjadi bukti bahwa pelaksanaan *good governance* di Indonesia belum tertata dengan baik.

Berdasarkan laporan terakhir dari Indeks *good governance* Indonesia (IGI) tahun 2016, Provinsi Riau berada di urutan ke 6 dari 34 Provinsi dan hanya Kabupaten Siak saja yang berhasil masuk 5 besar kabupaten/kota dengan *good governance* terbaik. Data ini menggambarkan masih belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintah yang baik terutama pada pemerintahan daerah dan Desa.

Salah satu indikator yang mempengaruhi *good governance* adalah kompetensi aparatur pemerintah desa. Untuk mendukung keberhasilan *good governance* dalam sebuah pemerintahan desa maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut, diantaranya yaitu kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan yang turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Menurut Sedarmayanti (2013:13) kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Kompetensi sumber daya manusia diperlukan karena dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat jumlahnya besar dan setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten maka dana desa akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para koruptor, karena semakin rendah kompetensi SDM maka resiko penyalahgunaan dana desa akan semakin besar sehingga kompetensi sumber daya manusia diperlukan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hood dan Lodge (2004) mengemukakan bahwa kompetensi menggambarkan ide-ide selektif dalam manajemen dan pelayanan publik sehingga tercapainya tata kelola yang baik. Menurut Jones Martin (2002:151) konsep kompetensi sangat berperan penting dalam tata kelola. Karena keberhasilan suatu organisasi menjadi pekerjaan penting dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofianty dan Denziana (2017), Helmayani *et al.*, (2017), dan Nasution (2015) yang mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Selain kompetensi aparatur pemerintah desa, indikator lain yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* adalah partisipasi masyarakat. Menurut H.A.R Tilaar (2009:287) partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Waheduzzaman (2008) mengatakan partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmayani *et al.*, (2017), Irma Sunarty (2015), Razak & Harfah (2015) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Selain partisipasi masyarakat, indikator lain yang mempengaruhi *good governance* adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pengendalian *intern* akan tercapai jika kelima elemen pengendalian *intern* telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian *intern* yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP No. 60 tahun 2008). Diperdana, Ardan (2019) mengatakan bahwa pengendalian intern harus diterapkan dalam tiap unit, kegiatan dan program. Tujuannya tidak lain untuk mencapai efisiensi, efektifitas, pengamanan aset, pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Adapun kaitan secara keseluruhan, ini merupakan pilar-pilar dari *good governance* penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nofianty dan Denziana (2017), Sari (2013) dan Habibie (2013) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap penerapan *good governance*

Melihat berbagai macam kemungkinan faktor yang mempengaruhi *good governance*, membuat penulis tertarik untuk mencoba mengangkat tema ini ke dalam sebuah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Hal ini dilakukan untuk mengukur kembali seberapa besar tingkat signifikansi faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* memberikan tingkat kepercayaan atas penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pada sampel penelitian yang mengambil tempat pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pada Pemerintah Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan

sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan *good governance* di Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan.

## 2. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Good Governance

Sedarmayanti (2010:67) menjelaskan bahwa pengertian *good governance* sebagai berikut: “Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”.

Menurut Renyowijoyo (2013: 11), *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.*” Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

### Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kompetensi menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Helmayani *et al.*, (2017) meyakini bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Menurut Nofianty dan Denziana (2017) kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H<sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap *good governance*

## Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Siti Irene Astuti D. (2011:32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Achmadi (2002:74) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi

Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Atas dasar penjelasan tersebut, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap penerapan *good governance*

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintahan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan Habibie (2013) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *Good Governance*. Dengan adanya beberapa penelitian ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sistem Pengendalian Intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

## 3. METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui penyampaian kuisisioner kepada responden di lingkungan Pemerintah Desa di tiga Kecamatan yang berada di Kabupaten Pelalawan.

### Objek Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan *good governance* maka penulis menetapkan ruang lingkup yaitu menggunakan variabel bebas antara lain adalah kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah dan variabel tidak bebasnya adalah penerapan *good governance*.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 104 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *proportional stratified random sampling*. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2014:65).

Data sampel yang digunakan adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 Desa dengan 9 Kecamatan yang berbeda dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data primer. Data ini bersumber dari kuesioner yang disebar ke Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala BPD dan Kepala Urusan (KAUR) Umum.

## Definisi Operasional Variabel

### Variabel Dependen

*Good governance* adalah Tata pemerintahan yang baik yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Sedarmayanti (2010:67). Variabel ini diukur dengan indikator partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya anggap, berorientasi, konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.

### Variabel Independen

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016:272). Variabel ini diukur dengan indikator motif, *traits* (karakteristik pribadi), *self concept* (konsep diri), *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan).

Menurut H.A.R Tilaar (2009:287) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Variabel ini diukur dengan indikator pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif, pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama, meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah, terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Variabel ini diukur dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan *good governance*. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerapan *Good Governance*.
- $\alpha$  = Konstanta.
- X1 = Kompetensi Aparatur Pemerintah.
- X2 = Partisipasi Masyarakat
- X3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- $\beta_{123}$  = Koefisien Regresi.
- e = Faktor Pengganggu (Error)

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner.

kuesioner yang disebar sebanyak 4 (empat) buah untuk setiap Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala BPD dan Kepala Urusan (KAUR) Umum, sehingga total penyebaran adalah 100 buah kuesioner. Dari 100 kuesioner yang dibagikan kepada responden, yang diterima kembali berjumlah 80 kuesioner. Namun dikarenakan sulitnya akses transportasi ke beberapa desa tujuan mengakibatkan 20 kuesioner tidak dapat disebar.

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Bagian ini akan mendeskripsikan hasil statistik data (variabel) yang digunakan, dengan menjabarkan pergerakan variabel untuk seluruh periode yang menjadi acuan.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner

yang telah disebarkan ke pemerintah desa di Kabupaten Pelalawan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penerapan *good governance*. Sedangkan variabel independen

pada penelitian ini adalah kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance	80	27.00	41.00	34.3125	3.32841
Kompetensi Aparatur Pemerintah	80	11.00	25.00	19.0375	3.29727
Partisipasi Masyarakat	80	8.00	20.00	16.2875	2.23433
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	80	9.00	25.00	20.9000	3.54572
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data dari output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel *good governance* mempunyai nilai minimum dan maksimum adalah sebesar 27 dan 41 dengan nilai rata-rata sebesar 34,31 dan standar deviasi sebesar 3,328.

Variabel kompetensi aparatur pemerintah mempunyai nilai minimum dan maksimum adalah sebesar 11 dan 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,03 dan standar deviasi sebesar 3,297.

Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai minimum dan maximum adalah sebesar 8 dan 20 dengan nilai rata-rata 16,28 dan standar deviasi sebesar 2,234.

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mempunyai nilai minimum dan maksimum adalah sebesar 9 dan 25 dengan nilai rata-rata 20,90 dan standar deviasi sebesar 3,545.

#### Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2014:456), suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel > 0,6. Jika nilai reliabilitas < 0,6 maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Good Governance	0,773	0,7	Reliabel
Kompetensi Aparatur Pemerintah	0,872	0,7	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,866	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,940	0,7	Reliabel

Sumber : Data dari output SPSS, 2020

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi pada variabel dependen

dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian data menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5 %.

Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu dengan melihat probabilitas *asympt.sig (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05 maka data dapat

dikatakan berdistribusi normal dan jika *asympt.sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas adalah

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test**

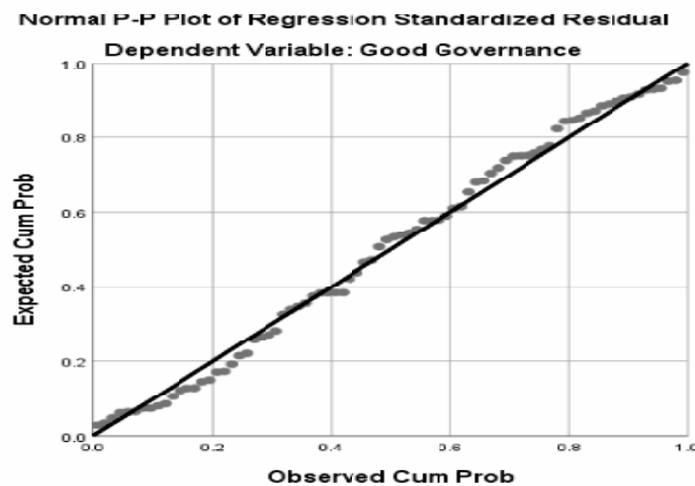
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.97037708
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.060
	Positive	.057
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data dari output SPSS, 2020

Dari uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ . Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

grafik histogram diatas. Kita bisa melihat bentuk grafik belanja modal mengikuti bentuk distribusi normal. Selain menggunakan histogram, kita juga bisa melihat uji normalitas dengan menggunakan grafik P-P Plots.

Untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat pada



Sumber : Data dari output SPSS, 2020

**Gambar 1**  
**Grafik P-P Plots**

Dari gambar diatas Normal *P-P Plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan Tabel 4 disamping terlihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Hasil perhitungan VIF diatas menunjukkan seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* > 0,10. Jadi dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

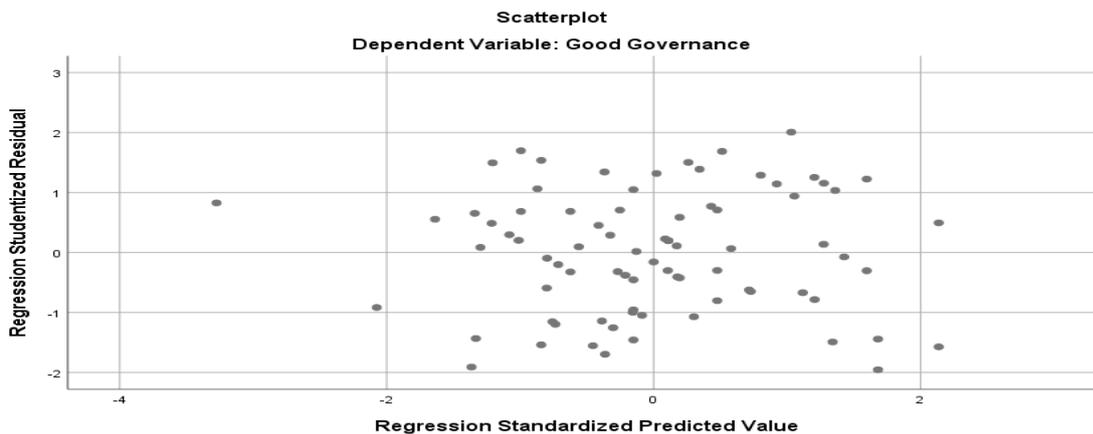
**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi Aparatur Pemerintah	.868	1.153
	Partisipasi Masyarakat	.814	1.228
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.794	1.260

Sumber : Data dari output SPSS,2020

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Data dari output SPSS, 2020

**Gambar 2**  
**Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dari gambar Scatterplot diatas terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui dan mendeteksi adanya autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini adalah menggunakan Durbin-Watson

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	Durbin-Watson
1	.806 <sup>a</sup>	1.830

Sumber: Data dari output SPSS, 2020

Dari tabel 5 diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,830 yang terletak pada pada rentang -2 dan +2 = -2 < 1,830 < +2. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

**Hasil Analisis Data**  
**Hasil Analisis Regresi**

**Tabel 6**  
**Hasil Persamaan Pertama (H1,H2,H3)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.400	1.956		5.829	.000
	Kompetensi Aparatur Pemerintah	.407	.074	.403	5.529	.000
	Partisipasi Masyarakat	.633	.112	.425	5.649	.000
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.232	.072	.247	3.247	.002

a. Dependent Variable: Good Governance  
Sumber : Data dari output SPSS,2020

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 11,400. Artinya adalah apabila variabel independen yaitu kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diasumsikan nol (0), maka *Good governance* sebesar 11,400.
- Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur pemerintah ( $X_1$ ) sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap *good governance* (Y). Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kompetensi aparatur pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *good governance* sebesar 0,407 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) sebesar 0,633. Hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap *good governance* (Y). Artinya adalah bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *good governance* sebesar 0,633 dan sebaliknya dengan asumsi

variabel lain tetap.

- Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal pemerintah ( $X_3$ ) sebesar 0,232. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap *good governance* (Y). Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *good governance* sebesar 0,232 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error ( $e$ ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan. Standar error ( $e$ ) juga menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Hasil Uji t (Uji Parsial)**

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah ( $X_1$ ), variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) dan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_3$ ) secara parsial atau masing-

masing mempunyai pengaruh terhadap *Good Governance* (Y).

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang diterima.

1) Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap penerapan *good governance* (H1)

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa t hitung (5,529) > t tabel (1,665) dan Sig. (0,000) < 0,05 , berarti kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nofianty dan Denziana (2017), Helmayani *et al.*, (2017), dan Nasution (2015) yang mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan terhadap penerapan *good governance*.

2) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan *good governance* (H2)

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa t hitung (5,649) > t tabel (1,665) dan Sig. (0,000) < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti apabila

partisipasi diterapkan dengan baik dan ditampung serta dikelola dengan baik maka akan meningkatkan *good governance*

pemerintah desa di Kabupaten Pelalawan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmayani *et al.*, (2017), Irma Sunarty (2015), Razak & Harfah (2015) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan *good governance* (H3)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa t hitung (3,247) > t tabel (1,665) dan Sig. (0,002) < 0,05. Hal ini berarti variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X<sub>3</sub>) berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nofianty dan Denziana (2017), Sari (2013) dan Habibie (2013) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

**Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Penelitian ini menggunakan R<sup>2</sup> (koefisien determinasi) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara komprehensif.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.806 <sup>a</sup>	.650	.636	2.00889	1.830

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Good Governance

Sumber : Data Output SPSS,2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,650. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap *good governance* adalah sebesar 65%. Sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**5. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance* di Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* di Kabupaten Pelalawan. Pengujian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kompetensi aparatur pemerintah maka semakin tinggi tingkat *good governance* di Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan.
  2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* di Kabupaten Pelalawan. Pengujian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat maka semakin tinggi *good governance* di Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan
  3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* di Kabupaten Pelalawan. Pengujian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin tinggi tingkat *good governance* di Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan.
- b. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pembangunan harus berdasarkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini harus selalu dilibatkan sejak awal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga seluruh dana untuk pengelolaan desa dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, diharapkan masyarakat dapat menjadi pengawas tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dana desa. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mendukung implementasi tata kelola pemerintahan desa yang baik.
  - c. Sistem pengendalian internal pemerintah sebaiknya menekankan kepada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut sehingga sistem pengendalian internal pemerintah bisa berjalan secara optimal.
2. **Bagi peneliti selanjutnya :**
    - a. Diharapkan agar lebih memperluas populasi dan sampel digunakan dalam penelitian, sehingga akan menghasilkan yang lebih baik.
    - b. Bagi peneliti selanjutnya, dalam pengumpulan data sebaiknya dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
    - c. Diharapkan peneliti selanjutnya, bisa menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penerapan *good governance*.

## Saran

### 1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Penelitian ini diharapkan agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan baik secara transparan maupun akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa berhasil. Hal ini akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., Muslim, M. Rusmiyati, S., dan Wibisono, S. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat, Transparansi Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cip
- Habibie. 2013. Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal terhadap Good Governance. *Jurnal Universitas Padang*.

- Leny Nofianti dan Anggrieta Denziana. 2012. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Penerapan GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG)*. Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim.
- Putu Lia Helmayani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawarata Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi pada Desa di Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Martin, Jones. 2002. *Auditing and financial of company*. Published by John Wiley and Sons, New York.
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sedarmayanti. 2010. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju. Bandung.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5495. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa*
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. *Governance for sustainable human development*.
- Wibowo, Prof. Dr. 2016. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Waheduzzaman. 2008. *Community participation and local governance*. Australia Journal of Political Science